

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 168/MEN/2000.

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR: KEP-1897/MEN/1987

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IJIN PENGGUNAAN LIFT, IJIN PENGGUNAAN BOILER, DAN IJIN KERJA MALAM, KELEBIHAN JAM KERJA DAN WAKTU LIBUR SERTA IJIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING DALAM BIDANG PARIWISATA KHUSUS UNTUK HOTEL, WISATA BAHARI DAN OBJEK WISATA KEPADA MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI.

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan dan pengawasannya secara
 efektif, maka perlu ditinjau kembali Keputusan Menteri
 Tenaga Kerja yang mengatur mengenai Pelimpahan
 wewenang Pemberian Ijin Penggunaan Lift, Ijin
 Penggunaan Boiler, Ijin Kerja Malam, Kelebihan Jam Kerja
 dan Waktu Libur serta Ijin Penggunaan dan Prosedur dan
 Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga
 Negara Asing Pendatang dalam bidang Pariwisata khusus
 untuk Hotel, Wisata Bahari dan Obiek Wisata.
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Uap Tahun 1930 (Ordonansi Tahun 1930 no.225.
- 2. <u>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951</u> tentang Undang-Undang Kerja.
- 3. <u>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951</u> tentang Pengawasan Perburuhan;
- 4. <u>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958</u> tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing.



- 5. <u>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969</u> tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
- 6. <u>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970</u> tentang Keselamatan Kerja.
- 7. <u>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999</u> tentang Pemerintah Daerah.
- 8. <u>Keputusan Presiden RI. Nomor 75 Tahun 1995</u> tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
- 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-04 Tahun 1989 tentang Tata cara Mempekerjakan Pekerja Wanita pada malam hari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERTAMA Mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP1897 /MEN/1987 tentang Pelimpahan Wewenang
Pemberian Ijin Penggunaan Lift, Ijin Penggunaan
Boiler, Ijin Kerja Malam, Kelebihan Jam Kerja dan
Waktu Libur serta Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Warga
Negara Asing Pendatang dalam Bidang Pariwisata
Khusus untuk Hotel, Wisata Bahari, dan Objek Wisata.

KEDUA Wewenang Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETIGA Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP.1897/MEN/1987 sebagaimana tercantum dalam Amar PERTAMA serta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000.

